

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dimaknai sebagai aktivitas untuk mengekspresikan tujuan umum, keputusan pemerintah, otorisasi formal, program maupun output dan sebuah proses. Selain itu kebijakan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan yang diwujudkan dalam suatu tindakan dan melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para aktor-aktor kebijakan. Menurut Thomas R. Dye dalam (Handoyo, 2012) kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu *society*, *political system*, dan *public policy* atau lebih dikenal dengan segitiga kebijakan Dye. Di Indonesia sendiri, kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya baik dalam aspek pendidikan, tingkat pendapatan masyarakatnya, tingkat kemiskinan, kualitas hidup, maupun daya saingnya.

Perkembangan dan pembangunan daerah setiap waktu memiliki prioritas yang berbeda sesuai kebutuhan setiap kota. Para pemikir modernisme memiliki pandangan bahwa perkotaan sebagai bentuk idealisasi dan Gpertanggungjawaban dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, hal ini seringkali justru tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut pemikiran Decrates pada Setiawan (2017), konsep ruang disebut sebagai ruang mutlak, sedangkan menurut Kant ruang disebut sebagai ruang abstrak. Dari kedua pemikiran tersebut, Henri Lefebvre mempresentasikan konsep ruang dalam bentuk ruang sosial. Hal tersebut karena konsep ruang yang disebut sebagai ruang abstrak dan ruang mutlak bersifat subyektif tergantung siapa yang menggunakannya. Para perancang kota memaknai konsep ruang sebagai ruang abstrak sedangkan masyarakat menganggap konsep ruang sebagai ruang mutlak.

Dari penjelasan di atas pada intinya spasialisasi merupakan perpaduan dari tiga komponen. Pertama, praktek spasial terkait sistematis zona dan wilayah yang dari waktu ke waktu yang di implementasikan melalui lingkungan dan perencanaan tertata berupa sektor properti serta bentuk operasional kapital lainnya. Kedua, yaitu representasi ruang, bentuk pengetahuan, dan kemampuan mengatur praktik perencanaan dan keterlibatan pemerintah. Ketiga yaitu pengalaman kolektif ruang, hal ini berhubungan dengan ruang representasi yang dialami oleh setiap orang seperti halnya peran pasar dalam membangun sistem penciptaan dan akumulasi keuntungan (Aminah, 2015). Namun penataan ruang sampai saat ini hanya dilihat hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan dan pembangunan yang berorientasi profit atau hanya bersifat semata untuk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan tertentu yang sulit terhindarkan oleh perkembangan zaman. Dari hal tersebut maka alangkah pentingnya mempertimbangkan apakah tujuan penataan dan penggunaan ruang sudah sesuai dengan alokasi fungsi ruang tersebut (Lisdiyono, 2007).

Setiap kebijakan yang lahir dianggap sebagai produk politik. Sama halnya dengan penelitian terdahulu (Salahudin, 2022) yang berfokus pada sebuah wacana politik mengenai pembangunan perkotaan meliputi kota atau daerah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor dan penanggungjawab serta penguji keberhasilan suatu kebijakan dimana kebijakan sendiri pada dasarnya merupakan produk politik. Keberhasilan suatu kebijakan publik yang dilakukan akan berdampak peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah, namun sebaliknya apabila suatu kebijakan dianggap gagal hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Secara tidak langsung, suatu pembangunan atau revitalisasi kota menciptakan bias terhadap sumber daya manusia, fasilitas perkotaan, pelayanan publik maupun tata kelola serta kenyamanan

masyarakat sehingga perlu keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penataan perkotaan.

Kota sendiri adalah pusat dari pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut tentu menghadirkan perubahan-perubahan tata ruang di perkotaan melalui perubahan karakteristik sebagai kota industri modern maupun kehadiran para investor dan pengembang yang melakukan pembangunan gedung, fasilitas umum, dan ruang publik lainnya. Ruang sebagai produk politik menyebabkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan regulasi. Sehingga ruang tidak pernah netral dan pasif. Praktik penataan ruang sendiri meliputi produksi, dan reproduksi ruang yang didalamnya terdapat kepentingan yang diperjuangkan dari kelas-kelas penguasa. Oleh karena itu diperlukan pendekatan sosial-spasial dalam mengatasi problematika tata ruang khususnya di wilayah perkotaan (Lefebvre, 1991).

Pembangunan dan penataan ruang di perkotaan cenderung menukarkan suatu hal yang memiliki nilai yang sama agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan atau *exchange value* dibandingkan menggunakan sesuatu yang hanya bersifat subjektif maupun objektif atau *value in use* dengan berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Dari kasus penelitian sebelumnya terdapat perbedaan fokus dan objek penelitian sehingga terdapat kebaruan dimana penelitian ini berfokus pada implikasi kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Asani, 2018) yang berfokus pada pemanfaatan ruang yang melihat kota sebagai mesin untuk mewujudkan pertumbuhan melalui terobosan adanya konsep Kawasan Kota Baru dimana adanya dorongan bagi pemukiman yang terdampak lumpur lapindo Sidoarjo untuk segera direlokasikan. Hal ini di inisiasi oleh pihak swasta dengan landasan keterbutuhan masyarakat namun seiring perkembangannya mulai menawarkan hunian kelas elite yang

berorientasi *business value* yang didukung oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur disekitar kawasan hunian.

Penataan ruang di tiap wilayah kota saat ini dikelola secara otonom oleh Kepala Daerah. Hal tersebut merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah di tingkat daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri meliputi perekonomian, pelayanan masyarakat, dan sumber daya alam yang dimiliki. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat daerah sehingga tidak ada daerah tertinggal dan tidak terpenuhi kebutuhannya oleh pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan wewenang. Inovasi dan kreatifitas sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga diharapkan setiap daerah nantinya mengalami kemajuan (Permadi, 2018).

Disamping itu, sinergitas implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan. Salah satunya dapat diwujudkan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan merupakan salah satu jembatan kemandirian daerah guna menjaga demokrasi dan keutuhan NKRI dengan tetap di bawah binaan dan pengawasan pemerintah pusat. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam hal ini merupakan pembagian dari urusan pemerintahan atau *function* dan dikenal sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerapan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat di desentralisasikan dengan

kata lain perlu adanya peraturan dan program-program pemerintah pusat yang terukur dan terarah untuk dijalankan oleh pemerintah daerah (Putra, 2022).

Tugas pembantuan atau penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (pemerintah pusat). Seringkali tugas pembantuan diberikan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan. Tugas pembantuan kepada pemerintah daerah dinilai lebih bisa menjangkau masyarakat dibanding di level pusat. Pada hakekatnya asas pembantuan tidak sama dengan asas desentralisasi maupun dekosentrasi. Hal tersebut karena tugas pembantuan bukan dalam bentuk transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan namun pemberian bantuan pelaksanaan tugas secara operasional sehingga kewenangan tetap melekat pada lembaga yang memberi tugas kepada pemerintah daerah (Rauf, 2018).

Pemberian Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada daerah itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan pembangunan maupun revitalisasi yang dilakukan tidak inefisien. Melalui dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan sumber dana Revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan di Stanplat Colt menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) (KebumenEkspres, 2023). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan atau Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembangunan Tahun Anggaran 2023 dengan tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) serta komitmen yang kuat dari para pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2). Total anggaran dalam proses Revitalisasi Pasar Pagi di Stanplat Colt sebanyak Rp3

Milyar. Dimana sebanyak 2,7 Milyar untuk fisik dan sisanya untuk perencanaan (Muzaki, 2023).

Selaras dengan hal tersebut, kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Pasar Tumenggungan merupakan upaya implementasi rencana strategis sesuai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Hal ini ditujukan sebagai salah satu solusi untuk mencapai Visi dan Misi Daerah di masa kepemimpinan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Rista Ristawati Purwaningsih yaitu; MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan merujuk pada tampilan pasar rakyat yang lebih bersih, nyaman, aman, bersih dan teratur. Penataan wajah Kota Kebumen pada masa kepemimpinan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Rista Ristawati Purwaningsih sudah dimulai sejak tahun 2021 berupa (Maharani, 2022) :

1. Pengubahan nama jalan di Kabupaten Kebumen.
2. Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di wilayah Kota Kebumen.
3. Pembuatan Moro Soetta di sekitar Pasar Tumenggungan Kebumen.
4. Renovasi Alun-Alun Kota Kebumen.
5. Relokasi Pasar Pagi Pasar Tumenggungan Kebumen

Konsep penataan ruang ini diharapkan mampu mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih sesuai dengan fungsi dan perannya, serta meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi. Upaya penataan wajah Kota Kebumen dinilai sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, isu strategis dan kondisi objektif

yang diinginkan. Hal tersebut dijelaskan pada BAB 1, Pasal 1 Ayat (34) bahwa, kawasan strategis adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, maupun kelestarian lingkungan. Penjelasan lebih lanjut yaitu mengenai arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah meliputi; perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten, perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten, dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten untuk kepentingan ekonomi yang meliputi Kawasan Strategis Kota Kebumen.

Relokasi dan Revitalisasi Pasar Pagi Kebumen diatur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Saran Perdagangan. Proses Relokasi Pasar Pagi ke Stanplat Colt sendiri ditangani langsung oleh dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen guna koordinasi lahan Stanplat Colt yang akan digunakan untuk para Pedagang Pasar Pagi Kebumen. Revitalisasi Pasar Pagi Kebumen berupa lapak atau los di area Stanplat Colt sudah dimulai sejak 7 Juni 2023 dan ditargetkan selesai dalam 4 bulan yaitu pada 6 Oktober 2023 (Satria, 2023). Para Pedagang Pasar Pagi untuk sementara waktu menempati Stadion Candradimuka dan akan resmi pindah ke Stanplat Colt setelah pembangunan selesai.

Semula, Pasar Pagi Pasar Tradisional Tumenggungan Kebumen bertempat di pelataran Pasar Tumenggungan dan menempati lahan parkir yang dikelola oleh pihak swasta dengan jam operasional dimulai pada pukul 01.00 sampai 07.00 WIB. Beberapa hal yang melatar belakangi Relokasi Pasar Pagi diantaranya yaitu munculnya konflik antara pedagang dan pengelola parkir berupa pungutan liar atau penjualan lahan dagang sebagai bentuk sewa lahan parkir kepada para pengelola lahan parkir. Selain itu,

pemindahan pasar pagi ke Stanplat Colt Kebumen dinilai sangat representatif. Hal ini dilihat dari luas area yang memadai, dan mudahnya aksesibilitas para pedagang selama proses berjualan. Selain itu, relokasi Pasar Pagi ini dinilai dapat mendorong aktivitas perekonomian di Stanplat Colt dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang sebelumnya sudah ada di area salah satunya ruko-ruko yang saat ini banyak yang tutup (Heksantoro, 2022) .

Stanplat Colt Kebumen digunakan sebagai tempat pemberhentian para supir angkot, dan *mini bus* selama beroperasi dan melintas di Kabupaten Kebumen. Semenjak masa Covid-19 lalu, stanplat colt sangat sepi, para supir mengeluh karena sangat sulit mencari penumpang. Hal ini berimbas pada ruko-ruko di area Stanplat Colt yang tutup dan tidak difungsikan kembali. Selain itu, imbas skema lalu lintas satu arah di Kota Kebumen yang baru baru ini telah ditetapkan dimana semula kendaraan masuk dari pintu gerbang timur saat ini di balik, semua angkutan baik minibus maupun colt masuk dari pintu sebelah barat. Hal tersebut membuat para supir engkel dan angkot kesulitan mencari penumpang yang mayoritas sebagai pelajar SMP-SMA (Kebumen, 2021). Sehingga dengan Relokasi Pasar Pagi Kebumen ke Stanplat Colt, pemerintah berharap dapat menaikkan aktivitas perekonomian di Area Stanplat Colt serta memaksimalkan fungsi lahan di area Stanplat Colt yang sudah lama tidak terpakai.

Dari hasil penelitian (Hasibuan, 2017) relokasi pasar tradisional memiliki dampak besar yang dirasakan oleh para pedagang seperti; kerugian dalam penjualan perharinya; kehilangan pelanggan tetap; kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan banyaknya barang dagangan yang akan diperjual belikan; sepi dari pengunjung; dan mahal nya harga sewa lapak; akan tetapi disisi lain kondisi lapak yang ditempati oleh para pedagang cenderung lebih bersih dan nyaman. Wacana terkait relokasi tentunya menjadi polemik bagi masyarakat karena hal tersebut menyangkut kepentingan banyak orang dengan mengubah

tatanan pengelolaan pasar. Relokasi dan revitalisasi pasar sebenarnya bukan hal yang asing dalam mengatasi suatu permasalahan. Namun, berawal dari dampak-dampak yang mungkin dirasakan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan melakukan relokasi dan revitalisasi Stanplat Colt sebagai tempat berjualan para pedagang Pasar Pagi Pasar Tumenggungan Kebumen bisa saja justru berbanding terbalik dari tujuan dan hasil yang diharapkan.

Menurut Gallion (1986) pasar tradisional merupakan bentuk paling awal dalam sebuah pasar, pasar tradisional sendiri terdiri dari stan, kios, dan lapak yang berada di ruang terbuka. Secara umum, kios-kios ataupun toko di pasar tradisional berada di sepanjang jalan utama dan berdekatan dengan pemukiman penduduk. Pasar tradisional dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan pertukaran hasil pertanian oleh para petani, dan pedagang sejak dahulu (Sekolahan, 2019). Pasar tradisional merupakan pasar yang sangat erat dengan masyarakat Indonesia. Interaksi yang kompleks antara penjual dan pembeli seringkali menimbulkan suatu hubungan yang dapat terjalin erat di dalam masyarakat. Pasar tradisional merupakan pasar yang proses jual belinya dilakukan secara langsung dan memprioritaskan produk lokal. Dengan adanya pasar, masyarakat dapat senantiasa memasarkan produk ataupun jasanya tanpa harus bersaing dengan produk asing atau barang import karena memprioritaskan produk lokal ataupun hasil sumber daya alam yang ada di sekitarnya

Menurut Armi (2016) mungkin apabila dilihat secara konsep, relokasi memiliki definisi yang sangat sederhana yaitu memindahkan suatu hal ke lokasi yang lain. Namun, dalam implementasinya relokasi mencakup dalam berbagai aspek termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi, serta kemampuan adaptasi pada hal baru yang tidak semua orang dapat melakukannya. Dengan dilakukannya penataan dan pembangunan pasar, secara tidak langsung terjadi perubahan sosial dimana peran-peran sosial tergantikan sehingga

menyebabkan perubahan perilaku pada aspek kehidupan. Selain itu, pemilihan lokasi juga memiliki peran yang sentral dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah, yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan pasar selama penetapan Relokasi dan Revitalisasi Pasar Pagi Pasar Tumenggungan Kebumen sebagai pusat belanja bagi masyarakat.

Perbedaan kepentingan antara pedagang dan pemerintah daerah tidak jarang menimbulkan sebuah konflik. Dari hasil penelitian (Fauzi, 2022) tentang konflik pedagang pasar akibat relokasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo, dijelaskan bahwa perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi dan kesamaan pemahaman antara pedagang dan pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo sebagai pengelola pasar menyebabkan konflik antara pemerintah daerah dengan pedagang kios di Pasar Legi. Hal-hal yang menjadi konflik yaitu seperti sempitnya luas kios yang berbanding terbalik dengan luas pasar serta luas kios sebelumnya yang dinilai 2 kali lebih besar, selain itu diberlakukannya sistem zonasi dagangan dinilai sangat tidak representatif dan merugikan pedagang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi kuasa dan peran antar aktor dalam konsep Hegemoni Antonio Gramsci terhadap kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen?
2. Bagaimana dampak ekonomi selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keterlibatan antar aktor dalam konsep Hegemoni Antonio Gramsci terhadap kebijakan relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen.

2. Menganalisis dampak ekonomi selama proses relokasi dan revitalisasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, adapun manfaat yang diharapkan didapatkan melalui penelitian ini yaitu meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan pemahaman baru bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan pengembangan ilmu pemerintahan terkait Relokasi dan Revitalisasi Pasar Pagi dari perspektif implikasi kebijakan. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dalam penelitian lain dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen/Kota dalam proses perumusan kebijakan di Kota Kebumen melalui kebijakan Relokasi dan Revitalisasi Pasar Pagi sebagai satu rangkaian kebijakan dalam proses Penataan Wajah Kota di Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Disamping itu, diharapkan melalui penelitian ini juga dapat membantu aktor kebijakan dalam membaca dan memahami pentingnya peran partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan penerapan kebijakan daerah.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Relasi Kuasa Hegemoni

Relasi kuasa pada konsep Hegemoni menurut Antonio Gramsci (1929-1935) dalam Faruk (2014:132) adalah sebuah gagasan yang menganggap “kepemimpinan” adalah hegemoni secara literal. Gagasan dan opini-opini tidak muncul dengan sendirinya dari otak

individu melainkan memiliki pusat informasi, iradiasi, penyebaran dan persuasi. Hegemoni merupakan hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok pemimpin yang bersifat kompleks diikuti dengan kekuasaan yang menguasainya secara sukarela tanpa adanya kekerasan dan penindasan. Hegemoni kelas penguasa dengan hegemoni yang dikuasainya pada dasarnya dibangun berdasarkan mekanisme konsensus atau persetujuan antar kelas sosial secara spontanitas psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Sehingga dengan kata lain, relasi kuasa hegemoni muncul melalui kesepakatan atau persetujuan antar kelas sosial tanpa melalui kekerasan atau penindasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Konsensus ini selama berjalannya waktu digunakan sebagai bentuk “komitmen aktif” berdasarkan pandangan bahwa posisi tinggi yang ada adalah sah atau *legitimate* dan ditaati oleh setiap kelas-kelas yang ada sehingga tidak ada pertentangan ('Amaliyah, 2019).

Gagasan atau ide dalam hegemoni dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk menjembatani sastra yang memiliki peran merangkai gagasan-gagasan disandingkan, diartikulasikan, dipelesetkan maupun ditegaskan. Teori hegemoni menjelaskan bahwa transformasi atau perubahan bukanlah peristiwa yang singkat namun melalui proses perjumpaan dan negosiasi dari berbagai intelektual organik dengan kelompok subaltern. Selain itu, Gramsci juga meyakini bahwa ideologi merupakan isi dari hegemoni yang berfokus pada pembentukan kesadaran massa dengan menegaskan bahwa perkembangan politik dan budaya kelas subaltern tidak dilakukan dengan spontan tetapi dengan kesadaran (Rosman Tami, 2021).

a. Negara dan Masyarakat Sipil (*civil society*)

Hegemoni Gramsci dalam (Salahudin J. , 2014) menjelaskan bahwa negara merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan masyarakat sipil dengan struktur ekonomi. Negara merupakan hal yang kompleks dari aktifitas praktis dan teoritis

dimana kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya namun memperoleh persetujuan dari kelompok yang berada di bawah kekuasaannya dengan menanamkan ideologi mereka sebagai (*common sense*) agar tanpa sadar masyarakat dapat menerimanya. Gramsci membedakan negara menjadi dua bagian yaitu masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat politik.

Masyarakat sipil dalam (Yusuf, 2017) adalah wadah perjuangan kelas dan demokrasi kerakyatan. Selain itu, masyarakat sipil juga wadah bagi kelompok sosial dominan dalam mengatur konsensus dan hegemoni sekaligus wadah kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinate*) dalam menyusun perlawanan mereka untuk membangun sebuah hegemoni alternatif (*counter-hegemony*). Di dalam kelompok masyarakat sipil seringkali terdiri dari semua organisasi swasta yang bersifat sukarela seperti serikat pedagang, lembaga pendidikan, partai politik, organisasi masyarakat maupun organisasi amal.

Sedangkan pengertian masyarakat politik menurut Gramsci dalam (Simon, 1999) masyarakat politik ditujukan kepada hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing termasuk dalam fungsi koersif. Hubungan-hubungan koersif tersebut terwujud dalam berbagai lembaga negara; angkatan bersenjata, polisi, lembaga administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial, dan sebagainya yang bergantung kepada upaya akhir dari efektifitas monopoli negara dalam melakukan tindakan koersif tersebut. Sehingga pada dasarnya, masyarakat sipil (*civil society*) dan negara terbentuk melalui berbagai hubungan sosial dimana negara dalam hal koersif menjelma menjadi organisasi terstruktur. Karena negara memiliki kekuatan koersif, maka dengan sangat mudah untuk menghegemoni masyarakat sipil ditambah beberapa organisasi di dalam masyarakat sipil merupakan wujud dari masyarakat politik (negara) seperti lembaga

pendidikan dan ikatan profesi aparatur yang secara struktural di bawah kekuasaan negara karena meskipun lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat sipil. Sehingga, masyarakat sipil dan masyarakat politik tidak bisa dipahami sebagai bagian terpisah yang tidak memiliki hubungan.

1.5.2 Teori Dampak Kebijakan Ekonomi

Dampak menurut Soemarwoto dalam Wahyuni (2017) merupakan perubahan yang terjadi akibat suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Dampak memiliki dua jenis yaitu dampak positif dan dampak negatif. Banyak faktor yang menentukan dampak tersebut masuk dalam kategori positif atau negatif, salah satunya dapat dilihat apakah kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan seseorang. Menurut Irawan dalam (Sari, 2015) dampak adalah suatu perubahan yang terjadi secara fisik maupun sosial akibat dari adanya penetapan suatu kebijakan di tengah masyarakat. Dampak mencakup dari suatu intervensi program untuk kelompok sasaran tertentu baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan, serta sejauh mana akibat tersebut mampu melahirkan pola perilaku baru pada masyarakat.

Untuk mengetahui terjadinya suatu dampak ekonomi akibat output kebijakan, maka dampak ekonomi dikelompokkan menjadi tiga menurut indikator Stynes dalam Nayoan (2021):

1. *Direct effect*, pada indikator meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak dan tingkat pendapatan.
2. *Indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu, jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti, variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan.
3. *Induced effect*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Selain dari ketiga indikator di atas, menurut Cohen dalam Agustina (2016) dampak ekonomi juga dapat berupa dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap aktivitas ekonomi, dan dampak terhadap pengeluaran. Dampak juga dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga menampilkan berbagai perspektif.

1.6 Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator	Definisi
1.	Relasi Kuasa Hegemoni	a. Negara	Perubahan hubungan sosial yang terjalin, konflik, dan bentuk koordinasi antar aktor lembaga negara yang terlibat selama proses relokasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing termasuk dalam fungsi koersif.
		b. Masyarakat sipil atau (<i>civil society</i>)	Peran masyarakat sipil sebagai wadah bagi kelompok sosial dominan yaitu paguyuban pedagang Pasar Pagi Tumenggungan, para pedagang pasar pagi, maupun para supir angkutan umum dalam mengatur konsensus dan hegemoni sekaligus wadah kelompok sosial yang lebih rendah (<i>subordinate</i>) dalam menyusun perlawanan mereka untuk membangun sebuah hegemoni alternatif (<i>counter-hegemony</i>).
2.	Dampak Ekonomi	a. Pendapatan pedagang	Perubahan pendapatan ekonomi yang diterima pedagang dan Dinas Pendapatan Daerah Kebumen sebelum maupun sesudah dilakukannya revitalisasi dan relokasi pasar pagi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

			seperti lokasi revitalisasi pasar pagi, aksesibilitas masyarakat dengan lapak pedagang, dll.
		b. Pengeluaran pedagang	Perubahan pengeluaran ekonomi yang diterima pedagang sebelum dan Dinas Pendapatan Daerah Kebumen sebelum maupun sesudah dilakukannya revitalisasi dan relokasi pasar pagi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lokasi revitalisasi pasar pagi, aksesibilitas masyarakat dengan lapak pedagang, dan lain-lain.
		c. Aktivitas ekonomi	Perubahan aktivitas ekonomi meliputi produksi dan distribusi barang dagangan dari produsen maupun agen perantara yang terjadi sebelum maupun sesudah dilakukannya revitalisasi dan relokasi pasar pagi. Aktivitas ekonomi juga dapat diamati dari tingkat keramaian pasar pagi dari pembeli yang datang. Perubahan tersebut terjadi akibat beberapa faktor seperti aksesibilitas dan lokasi penyimpanan barang yang jauh dari tempat relokasi saat ini.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu perencanaan penelitian yang nantinya akan menjadi rujukan peneliti selama proses pengumpulan data, analisis, dan menginterpretasikan hasil observasi penelitian (Nachmias, 1976). Selama proses penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan berusaha menjawab

permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan data yang ada melalui proses analisis data dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan (Narbuko & Ahmad, 2015).

Menurut Craswell (2016, hlm. 4) penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian dengan cara mengkaji lebih dalam dan memahami makna suatu fenomena maupun permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi pada individu maupun kelompok masyarakat. Craswell & Gutterman (2018, hlm. 46) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bergantung pada informasi dari objek penelitian melalui pertanyaan secara umum, pengumpulan data dari tanggapan partisipan yang sebagian besar berupa teks atau kata-kata sehingga membutuhkan analisis teks yang dikumpulkan secara subyektif.

1.7.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi adalah tempat dilakukannya suatu penelitian sedangkan situs penelitian merupakan objek pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Kebumen tepatnya di Pasar Pagi Tumenggungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Sarbini No. 89 Kebumen, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena selaku Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam proses Revitalisasi dan relokasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen sehingga peneliti akan lebih mudah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

1.7.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian menurut Idrus (2009) adalah individu, benda maupun organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Subjek dari penelitian ini yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, Kelompok Asosiasi Pedagang Pasar

Pagi Kebumen, serta aktor terkait yang terdampak dari adanya kebijakan Revitalisasi dan Relokasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen. Berikut informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
2. Kepala UPT Pasar Tumenggungan
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.
4. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen.
7. Supir Angkutan Umum Kebumen.
8. Pembeli Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti akan lebih mudah menjelaskan fenomena-fenomena sosial berupa ucapan, pendapat, gagasan maupun ide serta tindakan yang didapatkan peneliti selama proses penelitian dari pelaksanaan wawancara dengan informan. Data tertulis yang didapatkan peneliti nantinya akan diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi maupun non-resmi yang berasal dari subyek penelitian dan relevan dengan topik penelitian yang diajukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer memuat data yang didapat secara langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi kepada para informan. Hasil dari data primer ini nantinya akan dianalisis secara mendalam dan relevan dengan topik Relokasi Pasar Pagi

Kebumen dari Perspektif Politik Perkotaan terkait kebijakan Tata Kota Kabupaten Kebumen tentang Revitalisasi dan Relokasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini bersifat sekunder atau tambahan untuk dijadikan pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari jurnal, berita online maupun cetak, laporan dan dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder didasarkan dari jurnal penelitian terdahulu yang membahas mengenai Revitalisasi dan Relokasi Pasar Pagi Tumenggungan dalam pengambilan kebijakan, dan berita online media massa, dan website yang membahas mengenai Revitalisasi dan Relokasi Pasar Pagi Tumenggungan Kebumen.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data selama proses penelitian yakni didasarkan pada waktu, kondisi, biaya yang tersedia dan pertimbangan lainnya guna membuat penelitian menjadi efektif. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik proses pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Dari pengertiannya secara umum, observasi atau biasa disebut pengamatan adalah tindakan peneliti dalam menelusuri atau mencari tahu sesuatu hal yang terjadi dari suatu fenomena. Menurut Margono (2020), observasi merupakan teknik melihat dan mengamati berbagai perubahan atau fenomena sosial yang terus terjadi dan berkembang. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul melalui data yang dikumpulkan. Peneliti melakukan observasi dengan tujuan mengamati kondisi terkini setelah pemberlakuan kebijakan Revitalisasi dan Relokasi Pasar Pagi ke Stanplat Colt. Observasi ini dilakukan secara

sistematis tanpa membatasi pengamatan langsung atau tidak langsung dengan maksud memperoleh pengetahuan, dan mempersepsikan data yang di dapatkan sebelum melanjutkan proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara menurut Bungi (2013, 133) adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan melakukan suatu penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Dalam melaksanakan wawancara, pewawancara bisa menggunakan interview guide atau pedoman wawancara maupun tidak sesuai kebutuhan penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan agar lebih memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara nyata oleh pihak yang terdampak secara langsung yaitu para pedagang, pembeli pasar, pelaksana teknis relokasi pasar pagi, dan kepala bidang perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen serta dinas terkait lainnya yang terlibat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi berupa gambar, kutipan, dan bahan refrensi lainnya. Menurut Sugiyono (2013), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi baik berbentuk gambar, tulisan, maupun karya-karya monumental. Dokumen yang tergolong tulisan bisa berbentuk dalam catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, maupun kebijakan. Teknik dokumentasi yang diambil oleh peneliti sendiri bersumber dari dokumen atau arsip dari website terkait dan dokumentasi lapangan secara langsung yang didapat oleh peneliti saat melakukan penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2018, hlm. 285) adalah penguraian, perhitungan dan proses pengkajian data yang terkumpul selama proses penelitian guna

menjawab rumusan masalah sehingga memperoleh kesimpulan yang teruji. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018, hlm. 337) menyebutkan bahwa terdapat tiga tahap atau teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah data yang diperoleh secara langsung lapangan dengan jumlah yang banyak sehingga perlu dilakukan reduksi data dengan menganalisis data. Teknik analisis ini bisa dilakukan dengan cara merangkum, memilih data penting yang menjadi focus penelitian, dengan memperhatikan pola dan tema yang terjadi dan membuang data yang tidak diperlukan.

a. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan analisis dengan merangkum dan memisahkan data berdasarkan focus penelitian, selanjutnya peneliti akan menguraikan data yang di dapatkan dari observasi, wawancara, dokumentasi melalui penyajian yang tersusun sesuai pola penelitian untuk dijelaskan dalam bentuk naratif dan terstruktur sehingga mudah dipahami.

b. Kesimpulan (*Conlcusion*)

Pada tahap ketiga ini, peneliti akan mencoba menarik kesimpulan dan verifikasi data. Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan yang didapatkan bersifat sementara dan akan berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung tahap pengumpulan data. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan meninjau kembali data yang sudah diperoleh dengan tujuan mendapatkan kepastian, kesesuaian dan kebenaran teori dengan fakta yang terjadi.

1.7.7 Kualitas Data

Kualitas data menurut Mark Mosley (2008) dalam sebuah buku yang dibuatnya berjudul "*Dictionary of Data Management*" berhubungan dengan akurasi (*accuracy*),

kelengkapan (*complete*), *timely* (update), konsisten (*consistent*) dimana hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti. Menurut Wang & Strong (1996, b) terdapat syarat dan kategori kualitas data yaitu *accuracy*, hal ini membahas sejauh mana nilai dari data tersebut telah sesuai realitas di lapangan, kemudian *relevancy* yaitu hubungan keterkaitan data yang didapatkan dengan penelitian, *representation* atau seberapa jelas sebuah data dapat merepresentasikan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian secara jelas yang terakhir yaitu *accessibility* dimana hal ini berkaitan dengan kemudahan akses peneliti dalam mendapatkan dan menemukan informasi atau data yang telah didapatkan.